

DAFTAR PUSTAKA

1. Dokumen Publik dan Peraturan Perundang-Undangan

- Direktorat Jenderal Pajak. (2013). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2013 tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2018). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan *Business Development Services* (BDS).
- Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2008). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

2. Jurnal, Internet, dan Sumber Lain

- Ananda, C.F. (2021). *Asa Pajak UMKM*. Candra Fajri Ananda. Retrieved 13 April 2022, from <https://candrafajriananda.com/asa-pajak-umkm/#:~:text=Berdasarkan%20data%20dari%20Direktorat%20Jenderal,sama%20sebesar%20Rp711%2C2%20triliun.>
- Andika, Y.R. (2021). *Tinjauan atas Kontribusi Wajib Pajak UMKM yang Menerapkan PP 23/2018 terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Kisaran*. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Ariyanto, A. (2021). *Belajar Memulai Bisnis UMKM*. Entrepreneurial Mindsets & Skill, 35.
- Asmarani, N.G.C. (2020). *Apa Itu Pajak, Pajak Pusat, & Pajak Daerah?*. News DDTC. Retrieved 1 November 2021, from [https://news.ddtc.co.id/apa-itu-pajak-pajak-pusat--pajak-daerah-18859?page_y=2473.142822265625.](https://news.ddtc.co.id/apa-itu-pajak-pajak-pusat--pajak-daerah-18859?page_y=2473.142822265625)
- Putri, A.R. (2019). *Tinjauan Pelaksanaan Program Business Development Services (BDS) di KPP Pratama Bandung Bojonagara*. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Riyanto, D.A. (2019). *Tinjauan atas Pelaksanaan Business Development Service dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di KPP Pratama Bandung Cibeunying*. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Rohmawati, A. N., & Rasmini, N. K. (2012). *Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 1(2), 1-17.
- Setiyono, J. (2020). *Program Business Development Services: Upaya Nyata DJP Bangkitkan UMKM Direktorat Jenderal Pajak*. Pajak.go.id. Retrieved 2 November 2021, from [https://www.pajak.go.id/id/artikel/program-business-development-services-upaya-nyata-djp-bangkitkan-umkm.](https://www.pajak.go.id/id/artikel/program-business-development-services-upaya-nyata-djp-bangkitkan-umkm)
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.